

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti ingin mengupas mengenai permasalahan penambangan pasir Merapi di Kabupaten Sleman. Permasalahan ini layak dikupas untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bagaimana kompleksitas yang terjadi antara pihak-pihak pelibat dalam kasus penambangan pasir merapi di Kabupaten Sleman. Peneliti juga mendeskripsikan histori media lokal, khususnya Kedaulatan dan Harian Jogja dalam meliput isu-isu lingkungan. Disini peneliti turut menyertakan tiras bersama visi media lokal (Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja) untuk mendapatkan deskripsi yang lebih mendetail soal peliputan media lokal tersebut.

#### **A. Penambangan Pasir Merapi: Masalah dan Penanganannya**

Letusan gunung berapi merupakan salah satu peristiwa geologis yang tidak dapat dihindari. Jatuhnya korban jiwa dan kerusakan ekologi di sekitar merupakan permasalahan yang kerap ditinggalkan oleh bencana letusan gunung berapi. Letusan gunung Merapi pada tahun 2010 pun demikian. Saat musim penghujan tiba, sungai-sungai yang berhulu Merapi menjadi jalan untuk menghantarkan banjir lahar hujan ke bagian hilir. Banjir lahar hujan akhirnya berdampak pada menumpuknya material vulkanik berupa batu dan pasir di sepanjang aliran sungai.

Material vulkanik yang dikeluarkan Merapi pada letusan Oktober/ November 2010 mencapai tak kurang dari 150 juta m<sup>3</sup>, jauh berbeda dibandingkan letusan

tahun 2006 yang hanya memencapai 8 juta m<sup>3</sup>.<sup>67</sup> Material vulkanik dalam jumlah yang sangat besar menghambat sungai menjalankan fungsinya. Guna memulihkan fungsi sungai, pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan normalisasi sungai dengan tujuan memulihkan fungsi sungai.

Seiring dengan dilakukannya normalisasi sungai berhulu Merapi, beberapa pihak memanfaatkan peluang ini untuk menambang pasir guna mencari keuntungan ekonomi. Penambangan pasir dinilai sudah mengkhawatirkan. Penggalian pasir dilakukan hingga dasar sungai, hingga lebih dari 10 meter dalamnya.<sup>68</sup> Menurut BBWS Serayu Opak, sebelum letusan pada tahun 2010, kondisi dam-dam di sekitar Merapi yang kosong masih bisa dimungkinkan untuk menampung banjir lahar hujan. Namun sangat disayangkan, kekosongan ruang pengendalian lahar tersebut dalam keadaan rusak secara ekologis akibat penambangan pasir yang tak menggubris rekomendasi teknis.<sup>69</sup>

Di samping adanya kerusakan secara ekologis, aktivitas penambangan pasir tersebut tidak luput dari pelanggaran. Pelanggaran pada pelaksanaan di lapangan antara lain tonase kendaraan yang berlebih dan waktu penambangan.<sup>70</sup> Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (SDAEM) telah meminta masa jeda untuk penambangan pasir kepada pemerintah Kabupaten Sleman terhitung mulai 28

---

<sup>67</sup>Raharjo, S. Budi (Ed). 2012. *Sabo Merapi: Antara Mitos dan Teknos*. Yogyakarta: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. h.170

<sup>68</sup>*Ibid.* h.250

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Bupati Sleman Tolak Moratorium Penambangan Pasir Merapi. 2 Maret 2013. <http://www.antaraneews.com/berita/361231/bupati-sleman-tolak-moratorium-penambangan-pasir-merapi> Tanggal Akses: 1 Mei 2013

Februari 2013.<sup>71</sup> Penghentian sementara ini ditujukan guna melakukan evaluasi terkait dengan aktivitas penambangan seperti lokasi, waktu menambang, tonase kendaraan, dan lebar dan kedalaman sungai. Usulan SDAEM meminta masa jeda, dengan kata lain menghentikan sementara aktivitas penambangan pasir, ditolak oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dengan alasan endapan material vulkanik masih banyak.

Keuntungan yang bisa diperoleh dari pasir Merapi memang cukup besar. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Mineral Kabupaten Sleman Widi Sutikno, Pemerintah Kabupaten Sleman selama dua tahun selepas erupsi 2010 menerima pemasukan hasil galian C sebesar 12 miliar rupiah.<sup>72</sup> Nilai ekonomis dari pasir Merapi ini pun menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan utamanya ialah ketiadaan rencana pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut terhenti beberapa bulan sebelum Oktober 2010, karena ada salah seorang dari enam bupati (di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) yang berkaitan langsung dengan Merapi tak berkenan membubuhkan tanda tangan sebagai rekomendasi langkah awal dibentuknya suatu lembaga yang akan diberi peran cukup besar dalam melakukan pengelolaan.<sup>73</sup>

Dapat dipahami bahwa ada oknum bupati yang ingin mengelola sendiri pasir Merapi, tanpa ingin dicampuri oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal yang kemudian menjadi mencolok ialah dengan dikeluarkannya perda

---

<sup>71</sup> SDAEM Minta Penambangan Pasir Dihentikan. 14 Februari 2013. <http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/14/sdaem-minta-penambangan-pasir-dihentikan-379225> Tanggal Akses: 1 Mei 2013.

<sup>72</sup> Proyek Kali Lereng Merapi Dinilai Tak Transparan. 10 Februari 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/10/173460390/Proyek-Kali-Lereng-Merapi-Dinilai-Tak-Transparan> Tanggal akses 1 Mei 2013

<sup>73</sup> Raharjo, S. Budhi. (ed). *Op.cit.* h. 262

masalah penambangan pasir, namun tak ada satu pun perda yang dikeluarkan untuk menanggulangi banjir lahar di daerahnya. Padahal, pengelolaan pasir yang bernilai ekonomi itu berkaitan langsung dengan pengelolaan banjir lahar Merapi.<sup>74</sup>

Kata pengelolaan pun akhirnya bergeser maknanya, dari upaya menangani sesuatu secara mendasar dengan keterpaduan dan menerus menjadi perusahaan atau membisniskan sesuatu. Hal tersebut tampak dalam kegiatan normalisasi sungai yang bertujuan supaya fungsi sungai kembali normal. Jangankan memperbaiki, malah sungai pun dirusaknya sehingga Dam Sabo terancam hancur lebur.<sup>75</sup>

Kerusakan tersebut terjadi karena tidak ada mekanisme yang jelas dan regulasi yang mengatur pengelolaan pasir Merapi. Normalisasi pun akhirnya ditumpangi dengan kegiatan penambangan pasir. Padahal dalam SK Bupati, penambangan pasir telah dihentikan dan digantikan dengan normalisasi sungai.

## **B. Berita Lingkungan Hidup di Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja**

Pada 8 Juni 1992 Harian Kedaulatan Rakyat menurunkan tulisan tentang beberapa kendala yang dihadapi pers dalam meliput isu lingkungan hidup. Dalam tulisan itu, penulisnya, Riadho S., menerangkan kendala-kendala itu sebagai: (1) Informasinya bersifat multidisipliner; (2) informasinya tidak menarik dan (3) jajaran pers terlalu mementingkan kesuksesan komersial.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.* h.263

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Abrar, Ana Nadhya. 1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h.13

Mantan Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat, M. Soemadi Wonohito, SH., pernah mengatakan bahwa peranan pers dalam pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu mengangkat isu kemungkinan adanya pencemaran lingkungan dan bahaya yang ditimbulkan dari pencemaran atau juga menjadi mediator bagi pihak-pihak terkait dalam terjadinya kasus pencemaran lingkungan hidup. (Abrar h.66).

Permasalahan mengenai isu lingkungan kompleks, karena melibatkan banyak aktor (pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan lain-lain). Dalam hal ini media dapat menjadi mediator bagi aktor-aktor terkait untuk membantu memecahkan permasalahan lingkungan sekaligus sebagai pengawas bagi aktor-aktor yang terlibat.

Penelitian yang dilakukan oleh Eusebius Dwi Haryadi tentang pemberitaan kerusakan lingkungan di Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja tahun 2004, Kedaulatan Rakyat melibatkan beberapa aktor sebagai sumber informasi seperti pemerintah, pelaku industri, akademisi, sampai masyarakat awam. Penelitian ini menemukan bahwa di dalam pemberitaan Kedaulatan Rakyat terkait dengan isu kerusakan lingkungan tersebut, Pemerintah/Birokrat menjadi aktor yang paling banyak dilibatkan, dengan persentase 50% dari keseluruhan berita.<sup>77</sup>

Temuan lain dalam penelitian ini adalah media lokal Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja belum sepenuhnya melakukan pengawasan atau kontrol terhadap permasalahan lingkungan. Kerusakan serta permasalahan lingkungan yang banyak

---

<sup>77</sup> Lihat Tabel Unit Analisis Aktor yang dilibatkan dalam penelitian Eusebius Dwi Haryadi tentang Kerusakan Lingkungan Hidup di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Haryadi, Eusebius Dwi. 2005. *Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Surat Kabar*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h.96

diangkat adalah seputar bencana alam. Oleh kedua surat kabar (Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja) penyajian berita mengenai kerusakan lingkungan hidup masih sebatas di permukaan saja, bahkan hanya cenderung untuk memenuhi standar 5W 1H sebagai kaidah jurnalistik.<sup>78</sup>

Berbeda dengan Kedaulatan Rakyat, penelitian isu lingkungan di Harian Jogja justru menemukan bahwa Harian Jogja lebih menekankan aspek ekonomi dari penambangan. Dari penelitian Maria Elga Ayudi mengenai wacana pertambangan pasir besi di Kulonprogo dalam Harian Jogja, secara umum Harian Jogja belum sepenuhnya menggunakan pendekatan lingkungan hidup ketika memandang persoalan penambangan pasir besi di Kulonprogo. Harian Jogja cenderung memandang persoalan ini sebagai sebuah konflik antara masyarakat dan pemilik modal (perusahaan yang akan membuka tambang pasir besi). Persoalan lingkungan hidup dikerucutkan menjadi reklamasi dan eksploitasi sumber daya alam (pasir besi) demi keuntungan bersama yang sifatnya sangat ekonomistik.<sup>79</sup>

### **C. Pemberitaan Penambangan Pasir Merapi di Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja**

Setelah berakhirnya masa penambangan pasir Merapi pada tanggal 31 Juli 2012, media lokal masih terus memberitakan soal penambangan pasir Merapi. Tanggal 4 Agustus 2012 merupakan babak baru pemberitaan penambangan pasir Merapi. Jika sebelum 31 Juli 2012 penambangan pasir Merapi di wilayah kabupaten Sleman merupakan hal yang legal, maka dimulai 1 Agustus 2012

---

<sup>78</sup>*Ibid.* h.145

<sup>79</sup>Ayudi, Maria Elga Ratri. *Op.cit.* h.195.

penambangan pasir Merapi dihentikan dan digantikan dengan normalisasi sungai yang ternyata tetap dibarengi dengan kegiatan penambangan pasir Merapi.

Pada tanggal 4 Agustus 2012, Kedaulatan Rakyat maupun Harian Jogja turut menyorot kasus ini. Sebagai pembuka babak baru, Kedaulatan Rakyat meliput soal pembahasan regulasi di Komisi C DPRD Kabupaten Sleman soal penambangan di lahan pekarangan. Tak jauh berbeda, Harian Jogja juga meliput kasus ini, hanya Harian Jogja menyorot soal kesepakatan Empat Desa untuk melakukan penambangan di pekarangan. Dalam kedua pemberitaan tersebut, Kedaulatan Rakyat lebih mengarahkan soal regulasi di DPRD, tetapi Harian Jogja lebih mengarah kepada pembahasan di kalangan warga.

Dari kedua berita ini, kedua surat kabar lokal (Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja) memulai babak baru peliputan penambangan pasir Merapi. Seperti yang diberitakan Harian Jogja pada tanggal 22 Agustus 2012, Warga menginginkan agar pengerukan dihentikan dan digantikan dengan penambangan pekarangan. Namun, media lokal pada bulan berikutnya, September, lebih menekankan pada aspek kerusakan yang terjadi akibat penambangan. Seperti yang diberitakan Kedaulatan pada tanggal 6 September 2012 soal penghijauan lereng Merapi yang terancam gagal. Harian Jogja pada tanggal 3 September 2012 lebih menekankan kepada pencemaran udara yang terjadi.

Kontroversi penambangan pasir Merapi terlihat pada pemberitaan Harian Jogja pada tanggal 15 September 2012. Dalam pemberitaan itu disebut bahwa penambangan pasir tanpa izin, tetapi penambangan tetap dilakukan. Kontroversi lain terlihat pada pemberitaan Harian Jogja pada tanggal 19 September 2012,

dimana penambangan belum berizin, tetapi empat desa telah teken izin tambang pasir di pekarangan. Padahal, DPRD Sleman baru mendesak Pemkab Sleman untuk mengeluarkan rekomendasi pada pemberitaan Kedaulatan Rakyat 26 September 2012.

Kontroversi pun berlanjut di bulan Oktober 2012. Harian Jogja pada tanggal 1 Oktober 2012, meliputi soal belum adanya aturan penambangan pasir di pekarangan, tetapi masyarakat tetap dikenai pajak. Pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan puncak kontroversi legalitas penambangan. Dimana Harian Jogja meliputi soal penambang yang mengabaikan larangan pemerintah. Sedangkan Kedaulatan Rakyat meliputi soal Komisi C DPRD Sleman yang memanggil Eksekutif terkait warga yang tetap keruk material vulkanik.

Solusi pun keluar pada tanggal 6 Oktober 2012, dimana Kedaulatan Rakyat meliputi soal Keputusan Pemkab Sleman yang tak melarang penambangan pekarangan, tetapi melarang menggunakan alat berat. Setelah munculnya keputusan ini, warga membuka 30 hektar lahan pekarangan untuk ditambang. Bulan November dan Desember lebih mengarah kepada bagaimana kesiapan dan kewaspadaan penambang untuk menghadapi lahar dingin.

Bulan Januari 2013, kontroversi berlanjut. Berawal dari pelanggaran soal jam operasional oleh para penambang terhadap SK Bupati. Bulan Januari lebih berisikan soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti penambangan malam hari yang mengganggu warga, truk yang melebihi tonase hingga pengawasan aktifitas penambangan yang diperketat.

Di bulan Februari, wacana penghentian normalisasi sungai mulai berhembus di Kedaulatan Rakyat. Dimana pada tanggal 11 Februari 2013, WALHI menilai bahwa normalisasi sungai menyimpang. Empat hari kemudian, baik Kedaulatan Rakyat maupun Harian Jogja menekankan bahwa ada yang salah dengan normalisasi sungai sehingga kebijakan normalisasi sungai perlu dikaji ulang dan akhirnya dihentikan pada 28 Februari 2013.

#### **D. Profil Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan Rakyat pertama kali terbit pada 27 September 1945. Setelah kurang lebih tiga tahun memberikan informasi kepada masyarakat, Kedaulatan Rakyat sempat berhenti terbit sementara tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948. Ini terjadi karena Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibu Kota Republik Indonesia didudukipasukan Belanda, termasuk kantor Kedaulatan Rakyat dijadikan Belanda sebagai markas pasukannya.<sup>80</sup> Dalam kondisi genting tersebut, Kedaulatan Rakyat tidak diam begitu saja. Secara diam-diam wartawan-wartawan Kedaulatan Rakyat tetap melakukan perjuangan melalui tulisan-tulisannya pada selebaran bernama “Gerdak” (gerakan Rakyat Dalam Kota). Begitu pun dengan Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat pada saat itu yang ditahan oleh pasukan Belanda, Madikin Wonohito, tetap menulis di sebuah selebaran menyerupai koran bernama “Soeara Tapa” yang kemudian diedarkan pada seluruh tahanan. Akhirnya, setelah hampir tujuh bulan bergerak secara diam-diam, para wartawan

---

<sup>80</sup>Lihat Sejarah Singkat SKH Kedaulatan Rakyat dalam Clara Ima Fitria. 2012. *Penerapan Prinsip Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosentiel Pada Berita dan Opini Bencana Gunung Merapi di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*. UAJY: Skripsi. h.46

dan karyawan Kedaulatan Rakyat menerbitkan kembali surat kabar ini pada 29 Juni 1949.

Kedaulatan Rakyat memiliki semboyan “Suara Hati Nurani Rakyat”. Berdasarkan falsafah itu, menunjukkan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat membawa amanat rakyat yang mewakili suara rakyat.<sup>81</sup> Kedaulatan Rakyat juga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan rakyat dengan informasi yang diberikan. Kebijakan redaksional di SKH Kedaulatan Rakyat adalah independen, yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak atau narasumber, sehingga wartawan dalam menuliskan berita diharapkan seimbang.<sup>82</sup>

Dalam hal pemberitaan terhadap penambangan pasir Merapi, sebagai koran lokal tertua di Yogyakarta turut menyoroti kasus ini. Normalisasi sungai yang dibarengi dengan penambangan pasir, diberitakan oleh Kedaulatan Rakyat dengan 44 berita. Jumlah itu paling tinggi bila dibandingkan media lokal lain. Harian Jogja misalnya, hanya memberitakan 34 berita dan menduduki peringkat kedua terbanyak. Banyaknya jumlah pemberitaan yang dilakukan oleh Kedaulatan Rakyat, bisa jadi bertujuan memenuhi kebutuhan pembaca mereka yang berada di Kabupaten Sleman.

Pasalnya, Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua dalam hal tiras Kedaulatan Rakyat dengan total 35.534 eksemplar.<sup>83</sup> Peringkat pertama diduduki oleh Kota Yogyakarta dengan 49.229 eksemplar. Jumlah tersebut tersegmentasi

---

<sup>81</sup>Fitria, Clara Ima. 2012. *Penerapan Prinsip Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosentiel Pada Berita dan Opini Bencana Gunung Merapi di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h.49

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>Lihat Tabel Tiras dan Distribusi Kedaulatan Rakyat dalam Clara Ima Fitria. 2012. *Penerapan Prinsip Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosentiel Pada Berita dan Opini Bencana Gunung Merapi di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*. UAJY: Skripsi. h.50

lagi ke dalam beberapa jenjang pendidikan. Lulusan SMA misalnya menduduki peringkat 1 dengan 51,8 persen, disusul lulusan universitas sebesar 13,96 persen. Banyaknya jumlah lulusan SMA ketimbang Universitas pada akhirnya akan membawa pemberitaan Kedaulatan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan pembacanya.

### **E. Profil Harian Jogja**

Harian Jogja merupakan surat kabar lokal yang terhitung masih baru jika dibandingkan dengan Kedaulatan Rakyat. Harian Jogja pertama kali terbit di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2008. Kemunculan Harian Jogja tidak bisa dilepaskan dari Bisnis Indonesia yang merupakan induk perusahaan Harian Jogja.

Surat kabar harian Bisnis Indonesia pertama kali terbit pada 14 Desember 1985. Sesuai dengan harapan pendiri, Bisnis Indonesia ingin menyajikan informasi yang tidak hanya makro ekonomi, tetapi juga masalah mikro, perusahaan dan industri kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada dunia usaha.<sup>84</sup>

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sejarah pembentukan Harian Jogja<sup>85</sup>:

Bisnis Indonesia berkeinginan memperlebar sayap jangkauan media ke lingkup lokal. Pada bulan November 2007, Bisnis Indonesia membentuk tim studi untuk mengkaji layak atau tidaknya DIY mendapatkan surat kabar harian baru.

Tim studi yang dibentuk oleh Bisnis Indonesia tidak hanya dari pihak *intern*

<sup>84</sup> Sinaga, Florencius. 2009. *Proses Jurnalistik Penelitian Feature di Surat Kabar Harian Jogja*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Laporan Kuliah Kerja Lapangan. h. 28

<sup>85</sup> Hasil rangkuman peneliti dari Laporan Kuliah Kerja Lapangan Inge Setiawati Djajadi. 2012. *Tugas dan Tanggung Jawab Editor dalam Produksi Berita Surat Kabar Harian Jogja*. UAJY. h. 13-16

Bisnis Indonesia saja, tetapi juga turut melibatkan tim independen dari kalangan akademisi untuk menindaklanjuti hasil studi tersebut.

Pada bulan Februari sampai Maret 2008, Bisnis Indonesia melakukan survei tentang profil media lokal di DIY. Hasil survey tersebut adalah masyarakat DIY masih membutuhkan media-media yang membawa identitas lokal.<sup>86</sup> Dengan tujuan untuk menempatkan prioritas pada isu lokal, Harian Jogja memiliki komposisi berita nasional 45% dan lokal 55%.<sup>87</sup>

Mengenai ciri khas yang ingin ditonjolkan, Aditya Noviardi, wakil pemimpin redaksi, mengatakan bahwa Harian Jogja menempatkan isu lokal sebagai pengisi utama halaman muka dan bukannya isu Nasional:

Kemudian dari sisi isi, kita lebih banyak sesuatu yang sifatnya lebih lokal. Kalo kita lihat misalnya saudara-saudara kita orientasinya bukan koran lokal tapi koran nasional yang ada di lokal. Tapi kalo kita memang koran lokal, jadi isu-isu kita juga harus spesifik, lebih banyak mengenai soal hal yang tidak banyak diberitakan oleh koran lain.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>*Ibid.* h. 13

<sup>87</sup>*Ibid.* h.16

<sup>88</sup>Lihat wawancara Maria Elga Ratri Ayudi dengan Noviardi pada tanggal 18 Desember 2010 dalam Maria Elga Ratri Ayudi. 2011. *Wacana Pertambangan dan Praktik Jurnalisme Lingkungan Hidup Surat Kabar Lokal Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif dengan Metode Analisis Isi Wacana Kritis Norman Fairclough Mengenai Rencana Pembangunan Proyek Pertambangan Pasir Besi Kulonprogo dalam Tajuk dan Liputan Khusus di Surat Kabar Harian Jogja periode Juni 2008- November 2009)*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h.93